

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai adanya indikasi penyalahgunaan posisi dominan sebagai akibat dari merger yang dilakukan oleh perusahaan *decacorn* dan *unicorn* Gojek dan Tokopedia. Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, apabila transaksi merger tersebut menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat maka transaksi merger tersebut dilarang. KPPU memiliki wewenang untuk melakukan penilaian terhadap notifikasi yang diberikan, namun notifikasi yang diberlakukan wajib saat ini yaitu *post-merger notification* yang mana sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum persaingan usaha Indonesia sekarang. Meskipun Pasal 47 UU Antimonopoli menyatakan KPPU dapat membatalkan merger, KPPU belum pernah membatalkan merger. Skripsi ini menggunakan metode penelitian *socio fenomenologi* atau yuridis empiris dengan metode pengumpulan data berupa *library research* dan wawancara. Sebagai upaya pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat yang timbul akibat merger, diperlukannya penerapan *pre-merger notification*. Industri ekonomi digital cenderung memiliki struktur yang mengarah pada *contestable market*, namun dikhawatirkan perusahaan yang ingin masuk ke pasar yang sama memiliki *insecurity* terhadap keberhasilan usahanya. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang dapat mewadahi persaingan usaha disektor digital.

Kata kunci: Persaingan usaha tidak sehat, Merger, Industri ekonomi digital.

ABSTRACT

The focus of this study is indications of abuse of dominant position as a result of the merger carried out by decacorn and unicorn companies Gojek and Tokopedia. In the business competition law in Indonesia, if the merger transaction creates an unfair business competition climate, the merger transaction is prohibited. KPPU has the authority to evaluate the notification given, but the notification that is currently enforced is a post-merger notification which is not in line with the current requirements of Indonesian business competition law. Although Article 47 of the Antimonopoly Law states that KPPU can cancel a merger, KPPU has never canceled a merger. This study uses normative legal research methods with data collection methods in the form of library research. As an effort to prevent unfair business competition arising from a merger, it is necessary to implement a pre-merger notification. The digital economy industry tends to have a structure that leads to a contestable market, but it is feared that companies that want to enter the same market have insecurity about the success of their business. Therefore, regulations are needed that can accommodate business competition in the digital sector.

Key words: *Unhealthy competition, Merger, Digital economy industry.*